



Dinsos Desak Verifikasi Ulang Data

■ 57.000 Warga DIY Kehilangan Akses Jaminan Kesehatan Gratis

YOGYA, TRIBUN - Puluhan ribu warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terancam kehilangan akses terhadap layanan kesehatan gratis. Hal itu setelah status mereka sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan.

"Total seluruh DIY itu ada lebih dari 57.000 yang dicoret," kata Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintersih, Selasa (24/6).

Penonaktifan tersebut terjadi setelah Kementerian Sosial mengganti basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, warga yang datanya tidak tercantum dalam DTSEN secara otomatis kehilangan status kepesertaan bantuan jaminan kesehatan.

Pemerintah kabupaten/kota diminta segera memperbaiki dan memverifikasi ulang data agar bantuan bisa kembali diaktifkan. "Segera, karena orang sakit kan tidak ada yang tahu," tegas Endang.

Menurutnya, data DTSEN menjadi acuan baru pemerintah pusat dalam menyulurkan berbagai program perlindungan sosial. Verifikasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa penerima bantuan memang berasal dari kelompok rentan, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2, serta sebagian desil 3 dalam klasifikasi kesejahteraan.

"Penerima PBI JK kan kategori desil 1-2 dan desil 3 yang rentan," ujarnya.

Endang menambahkan, lonjakan jumlah peserta yang dinonaktifkan di DIY tahun ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mempertanyakan validitas keputusan tersebut, mengingat data DTSEN belum sepenuhnya diklarifikasi di daerah.

"Ini paling banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

Sebagai langkah alternatif, Endang menyarankan agar peserta yang dicoret dapat didaftarkan ke dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dalam

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memungkinkan peserta mandiri mendapatkan kembali akses layanan kesehatan. "Kabupaten/kota bisa segera memverifikasi agar bisa dimasukkan secepatnya ke PBBPU. Jadi nanti bisa mendapatkan lagi, terkakomodir bantuannya," jelasnya.

Sinkronisasi

Deputi Direktur Wilayah 6 BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, mengonfirmasi bahwa secara nasional lebih dari 3 juta peserta PBI JK dinonaktifkan akibat proses sinkronisasi data. DIY termasuk yang terdampak, dengan jumlah 57.349 peserta.

"Mohon memverifikasi data dan sebagainya, karena pemerintah menggunakan sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar Yessi.

Ia menambahkan bahwa proses ini dilakukan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang menggabungkan data dari berbagai kementerian, termasuk dari program Penysaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). "Sejumlah indikator pun digunakan untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan," jelasnya.

Penundaan verifikasi data di tingkat daerah dikhawatirkan akan memperpanjang ketidakpastian akses layanan kesehatan bagi ribuan warga kurang mampu di DIY. (han)

PERGANTIAN SISTEM

- Puluhan ribu warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terancam kehilangan akses terhadap layanan kesehatan gratis.
- Hal itu setelah status mereka sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan-Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan.
- Penonaktifan tersebut terjadi setelah Kementerian Sosial mengganti basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005